

## Peran Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

MH Ainulyaqin<sup>1\*</sup>, Sakum<sup>2)</sup>, Sarwo Edy<sup>3)</sup>, AS Rakhmat<sup>4)</sup>, Melinda Wulandari<sup>5)</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pelita Bangsa

\*Email korespondensi: [hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id](mailto:hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id)

### Abstract

*This study aims to determine the role of government programs in improving people's welfare during the pandemic in the perspective of Islamic economics in the people who receive BLT, BPNT, and PKH assistance in Telukjaya Village. This research is a qualitative approach with a field research. The data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. While the object of research is the community who received BLT, BPNT and PKH assistance during the pandemic as well as several Telukjaya Village staff. The results of this study, already from the results of interviews regarding the role of the Government's BLT, BPNT, & PKH assistance programs are correct. Measured using four indicators, namely: Accuracy of targets, program socialization, program objectives, and program understanding, it shows that almost all indicators are appropriate, except that program socialization has not been maximized due to regulatory constraints during the pandemic. In Sharia, it can be said that the government has implemented the principles of responsibility, justice, defense and security.*

**Keywords :** Role of Government, Welfare, Pandemic, Islamic Economy

**Saran sitasi:** Ainulyaqin, M. H., Sakum., Edy, S., Rakhmat, A. S., & Wulandari, M. (2023). Peran Program Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3643-3650. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10881>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10881>

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah penyelenggara sebuah negara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan bersama adalah program-program dengan tujuan yang meningkatkan kesejahteraan, baik dalam bidang pembangunan ekonomi maupun dari bidang pangan. Prinsip Ekonomi Islam dalam sebuah pemerintahan adalah hal penting dalam sebuah Negara, tanggung jawab pemerintah dalam Persepektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada *premis* bahwa Islam untuk mensejahterakan umum masyarakat (Hidayatullah, 2015). Dengan ini sejak krisis pangan tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Dalam empat tahun terakhir tren persentase penduduk miskin di Indonesia menunjukkan penurunan dari 60% pada tahun 1970 menjadi 11,4% pada tahun 2013. Namun demikian, terjadi perlambatan penurunan kemiskinan sejak tahun 2010, dari 1,2 %

pertahun pada periode 2006-2010 menjadi 0,5% pertahun pada 2010-2013 (Sulukin, 2019). Dengan keragaman masalah kala itu membuat pemerintah membentuk program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat kurang mampu merupakan kekuatan sekaligus tantangan bagi pemerintah. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan tersebut. pemerintah Indonesia telah mengadakan berbagai program bantuan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat kurang mampu. Mengenai kesejahteraan sosial yang mengatur tentang kesejahteraan sosial, diantaranya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Langkah ini ditempuh sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan target 19,2 juta keluarga miskin sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2004, BLT tidak bersyarat ini berjalan

pada oktober tahun 2005 sampai desember 2006. (Iping, 2020). Lalu pada tahun 2007 pemerintah Indonesia juga meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), Program ini bertujuan meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Mengenai kesejahteraan sosial dikuatkan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang kesejahteraan sosial, diantaranya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono tahun 2009 ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dan pada tahun 2011 lahir pula Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Begitu juga pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla juga mengeluarkan kebijakan permen dan perpres dengan bertujuan memperbaiki program perlindungan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan. Perihal program bantuan sosial, pemerintah telah menetapkan peraturan yaitu Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang sebagaimana dibentuk karena adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi Widodo pada rapat terbatas tentang Program Raskin di bulan Juli tahun 2016 dan tetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Selanjutnya peraturan No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa melalui pemberian Dana Langsung Tunai Bantuan-Dana desa. kemudian terdapatnya dua kebijakan dari Kementerian sosial Republik Indonesia yaitu keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial No 02/3/bs.02.01/01/2020 tentang indeks faktor penimbangan program bantuan sosial bagi program keluarga harapan (PKH) tahun 2020.

Kemudian pada awal tahun 2019 musibah pandemi covid-19 melanda negara Indonesia, banyak sektor terdampak akibat adanya pandemi covid-19, dan segala sesuatu yang melibatkan aktivitas sosial mulai terganggu. Penyebabnya pembatasan sosial menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu. Akibatnya ekonomi dimasyarakat menurun sangat drastis. Menurut Badan Pusat Stastistik perseptember 2020, Indonesia memiliki 27,55 juta penduduk miskin, jumlah ini meningkat dari September 2019 lalu menjadi 2,76 juta (BPS indonesia, 2020). Jelas bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi ambang resesi ekonomi (Indonesian economy quarter 1 2020 Grow 2,97

percent). Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya perekonomian pada masa pandemi maka pemerintah Indonesia mengeluarkan program bantuan sosial agar dapat menopang perekonomian selama pandemi covid-19 serta memperbaiki dan mengembangkan perlindungan masyarakat seperti BLT, BPNT, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik, program kartu sumbako, bantuan beras bulog, program keluarga harapan dan batuan-bantuan lainnya. Bantuan ini berjalan lancar setiap bulannya dan pada tahun 2020 bantuan ini meningkat secara drastis selama pandemic covid-19 untuk masyarakat penerima bantuan sosial tersebut.

Menurut Islam, Negara atau pemerintahan ini memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu (Hidayatullah, 2015). Keterlibatan pemerintahan ini menjadi sebuah tanggung jawab pemerintahan ketika ada sebuah masalah dalam suatu Negeranya. Dengan dibentuknya program pemerintah ini merupakan salah satu contoh adanya keterlibatan pemerintah yang bertanggung jawab kepada masyarakat yang mengalami krisis ekonomi (Hidayatullah, 2015). Tidak terlepas di Desa Telukjaya yang juga terkena dampak dari adanya pandemic covid-19, diaman sebagian besar masyarakat di Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang ikut mengalami dampak dari adanya covid-19 yang paling utama yaitu pada keadaan ekonomi yang menurun, dikarenakan menurunnya hasil pendapatan dan mengurangnya hasil panen. Sejumlah keluarga di Desa Telukjaya umumnya memiliki karakteristik kehidupan sebagai pedagang dan petani, hampir semuanya berkeluarga dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 5 orang, beberapa berstatus janda dan duda dengan tanggungan, Sebagian besar tidak tamat sekolah, adapula yang belum memiliki rumah layak huni, hampir semua data tersebut dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Para petani tidak bisa menjual hasil panennya ke pasar karena penutupan akses, pada kondisi normalpun, standar ekonomi masyarakat Kabupaten Karawang sudah dibawah rata-rata dengan penghasilan kurang (Mauludi, 2021). Karenanya, daerah di Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang merupakan salah satu penerima bantuan program dari Pemerintah.

Dengan itu, berjalannya program pemerintah seperti BLT, BPNT, dan PKH dimasa pandemi ini dianggap cukup baik oleh masyarakat kabupaten karawang, tetapi banyak penerima program bantuan pemerintah tersebut yang masih kurang memahami arti dari program bantuan pemerintah. Mulai dari pemanfaatan dana yang pada umumnya digunakan untuk hal konsumtif padahal bantuan tersebut diperuntukkan untuk modal usaha, apabila masyarakat Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang paham dengan arti bantuan ini dengan benar bantuan tersebut bisa dijadikan pendapatan setiap harinya. Masalah lainnya juga terjadi karena dari aparat pemerintah yang kadang tidak amanah dan tidak adil dalam bekerja, ada juga aparat pemerintah yang mementingkan diri sendiri dibanding masyarakat yang membutuhkan (Nata, 2022).

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian. Harta yang dikumpulkan dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat dan pemiliknyanya memanfaatkan dengan cara yang baik, sederhana dan jujur, maka harta yang masih tersisa di tangan pemiliknyanya wajib dilindungi oleh negara dan dijamin keselamatannya dengan undang-undang hak milik. Masyarakat pun wajib menghormati hak miliknya itu (Hidayatullah, 2015).

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan janganlah memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara batil seperti dengan sumpah dusta, ghosob, mencuri, suap, riba, dan lain sebagainya. Dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa penguasa berupa alasan-alasan batil untuk tujuan dapat memakan harta milik golongan manusia dengan cara batil, Sedangkan kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian.

Muhamad Aqim adlan (2021) pada penelitiannya ini melihat peran dan langkah pemerintah dalam menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sudut pandang Ekonomi Syariah. Hal ini didasarkan pada era pandemi covid-19 ini pada sektor ekonomi (UMKM) merupakan salah satu sektor

yang mengalami permasalahan. Irma Suryani (2010) tata cara penyaluran dan peran *Cash Direct* Uang Bantuan dalam upaya membantu menangani Perekonomian masyarakat, penelitian ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dan tidak terdaftar, sehingga masyarakat yang menerima bantuan BLT tidak menerima seluruh 300.000 karena penambahan lebih banyak orang miskin sesuai dengan kebijakan pemerintah desa setempat. Regina, (2020) Menurut hasil penelitian, keterlibatan pemerintah desa dalam pendistribusian BLT dari pemerintah di Kecamatan Maesaan tidak terlalu baik, terlihat dari banyaknya penerima BLT yang merupakan masyarakat yang tidak berhak. Lebih jauh lagi, banyak pemerintah desa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan seluruh masyarakat. Iping (2021) Konflik sifatnya dapat berupa konflik horizontal karena terjadi kecemburuan dan disharmoni antar masyarakat, serta sifatnya konflik vertikal karena sebagian masyarakat akan menuduh pemerintahan tidak adil dan tidak benar dalam menyalurkan bantuan tersebut. BLT ternyata juga menimbulkan konflik di tingkat keluarga. Selain dampak terhadap timbulnya konflik, dampak lainnya adalah pemicu timbulnya korupsi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini ada kualitatif deskriptif dengan pendekatan *field research* dalam pelaksanaan program bantuan Pemerintah berupa BLT, BPNT dan PKH pada masa pandemi covid-19 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dalam pandangan ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun tahap analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Hasil penelitian**

Desa Telukjaya merupakan sebuah Desa di Kabupaten Karawang yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Bekasi di sebelah barat. Oleh Karenanya mayoritas penduduk Desa Telukjaya adalah Suku Betawi dengan presentase 79% dari total jumlah penduduk, kemudian disusul oleh Suku Sunda dengan presentase 18% dari total jumlah penduduk dan suku terakhir adalah suku Jawa yang hanya ada 2% dari total jumlah penduduk. Berdasarkan data

administrasi kependudukan Desa Telukjaya per 31 September 2020 jumlah Kepala Keluarga di Desa Teluk Jaya adalah 1.576 KK dengan total penduduk sebanyak 6.299 jiwa. Jika dirinci berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, maka akan dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 1. *Umur dan jenis kelamin masyarakat*

Umur (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
0-5	328	347	675
6-10	307	323	630
11-15	415	305	720
16-20	304	315	619
21-15	270	292	562
26-30	278	240	518
31-35	250	274	524
36-40	208	232	440
41-45	211	208	419
46-50	176	189	365
51-55	136	112	248
56-60	117	101	218
61-65	70	65	135
66-70	46	70	116
>70	40	70	110
<b>Jumlah</b>	<b>3156</b>	<b>3143</b>	<b>6299</b>

Sumber: *Prodeskel Desa Telukjaya*

Mayoritas penduduk Desa Telukjaya bermata pencaharian sebagai petani baik itu sebagai pemilik sawah ataupun *hanya* sebagai penggarap. Tentunya hal ini dipengaruhi pula oleh luasnya lahan sawah di Desa ini. Meskipun di sisi lain terdapat pula jenis mata pencaharian lain yang dapat menopang kehidupan pangan masyarakat setiap harinya. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan:

Tabel 2. *Pekerjaan Masyarakat*

No	Jenis pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Pegawai Negri Sipil	42
2	TNI/POLRI	3
3	Pegawai Swasta	94
4	Wirausaha / Pedagang	194
5	Petani (Pemilik Sawah/Kebun)	780
6	Jasa Pertukangan	26
7	Buruh Tani	1127
8	Pensiunan	33
9	Nelayan	40
10	Usaha Percetakan Batu Bata	5

Sumber: *Prodeskel Desa Telukjaya*

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh tani merupakan yang terbanyak dari jenis mata pencaharian lainnya. Ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di sana. Faktor lainnya yakni jauhnya jarak dengan wilayah industri yang berada di daerah perkotaan, sehingga untuk angkatan kerja lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajatpun masih sulit untuk bisa merasakan bekerja di perusahaan atau PT. Jauhnya jarak dengan wilayah industri tidak membuat penduduk Desa Telukjaya kehilangan semangat untuk mencari nafkah. Dibuktikan dengan jumlah wirausaha yang menempati jumlahnya cukup banyak di Desa Telukjaya. Berdasarkan pengamatan, banyak terdapat jenis usaha di Desa Telukjaya, seperti konveksi celana anak, usaha percetakan batu bata, jasa vermak atau penjahit keliling, dan usaha penggilingan padi yang terbilang besar. Di samping itu banyak pula angkatan kerja yang memutuskan untuk berwirausaha sebagai pedagang.

Kondisi perekonomian Desa Telukjaya pada setiap tahunnya semakin meningkat secara signifikan dan terus berkembang hal ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak khususnya Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas terkait yang kegiatan dan bantuan di wilayah Desa Telukjaya yang sangat banyak memberikan perbaikan ekonomi bagi masyarakat dengan memberikan bantuan bibit padi unggul, bantuan handtraktor, dan bantuan lainnya sehingga meningkatkan tarap hidup masyarakat. Perekonomian yang ada di Desa Telukjaya merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan merupakan potensi unggulan yang terdapat di Desa Telukjaya. Adanya sungai dan irigasi di Desa Telukjaya dijadikan sumber pengairan utama bagi masyarakat petani di Desa Telukjaya sehingga pada saat musim kemarau dapat menjadi sumber cadangan air yang cukup memadai untuk kebutuhan petani dalam mengairi sawah dan ladangnya.

**Pelaksanaan program Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Dilihat dan sesuai hasil wawancara mengenai Ketepatan sasaran sudah terjadi dan tepat pada penerima BLT, BPNT, & PKH. BLT merupakan bentuk bantuan tunai dari dana desa kepada

masyarakat miskin di Desa dengan tujuan untuk meminimalisir pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Untuk memitigasi dampak pandemi covid-19, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin di desa dengan menggunakan uang tunai yang dikumpulkan dari dana desa. BLT senilai Rp 300.000 per bulan dalam bentuk uang yang diperuntukkan bagi setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan, diikuti dengan Rp 300.000 per bulan untuk tiga bulan berikutnya. Dalam pelaksanaan sudah tetap sasaran atau sudah sampai kepada pihak yang membutuhkan.

Selanjutnya mengenai sosialisasi program, informasi mengenai program-program bantuan yang diberikan pemerintah dilakukan melalui pesan digital yang disebar oleh RT dan RW kepada para pihak yang masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi interaksi secara langsung antar warga. Akan tetapi karena minimnya fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh Masyarakat di Desa Telukjaya menjadikan beberapa informasi yang diterima oleh masyarakat sangat kurang difahami atau bahkan salah mengartikan informasi bantuan dari pemerintah.

Dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh informan penerima bantuan program pemerintah dapat disimpulkan bahwa peran bantuan program pemerintah yang diberikan oleh pemerintah telah memberikan bantuan yang setidaknya cukup menambah kehidupan sehari-harinya. Dan tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan seperti bantuan BLT karena pemerintah sudah berusaha keras mendata serta menginput data warga tetapi memang ada tahapnya masing-masing. Hal ini didasari dari sifat tanggung jawab serta adanya bentuk pertahanan dan keamanan yang diterapkan oleh aparat pemerintah khususnya kepala RT yang menerama langsung setiap permasalahan yang ada.

### **3.2. Pembahasan**

#### **Peran program Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi**

Program BLT, BPNT, dan PKH merupakan bentuk perwujudan intervensi pemerintah melalui kementerian Sosial RI dalam rangka memberikan stimulus pengaman sosial di tengah masa pandemi

covid-19. Tujuan pemerintah membuat berbagai program kebijakan selama covid-19 yaitu untuk tetap melindungi dan meringankan beban masyarakat terutama bagi yang terdampak pandemi covid-19. Untuk melihat indikator tercapainya dari program bantuan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak covid-19 dapat diukur melalui pelaksanaan efektivitas program BLT, BPNT & PKH. Subagyo dan Budiani (2007) berpendapat bahwa efektivitas merupakan kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut Suharto (2011) efektivitas kebijakan/program merupakan suatu keadaan dimana hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan program. Sehingga dapat didefinisikan apakah sebuah program menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat, apakah dampak yang ditimbulkan program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan apakah program tersebut dapat mencapai tujuannya. Untuk melihat peran program BLT, BPNT & PKH pada masa pandemi covid-19 pada Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang diukur menggunakan 4 indikator menurut Budiani (2007) di antaranya yaitu:

#### **a. Ketepatan Sasaran**

Dalam hasil penelitian yang di dapatkan ketepatan sasaran selain kriteria program penerima sebagai syarat khusus pada masa pandemi covid-19 syarat khusus penerima bantuan adalah warga yang perekonomiannya menurun pada masa covid-19 dan warga yang terdampak covid-19. Indikator Ketepatan sasaran program merupakan sejauh mana peserta atau penerima program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Budiani, 2007). Indikator di dalam ketepatan sasaran program yaitu ditujukan kepada masyarakat atau yang biasa disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pada penelitian ini indikator ketepatan sasaran program dan yang menjadi target utama di dalam program BLT, BPNT & PKH di Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang bagi penerima program pemerintah. Hal ini sesuai dengan peraturan Surat Keputusan Direktur Jendral Fakir Miskin No 22/6/Sk/Hk.02.02/6/2020 dan keputusan direktur jendral perlindungan dan jaminan sosial No 02/3/bs.02.01/01/2020 tentang indeks faktor penimbangan program bantuan sosial bagi

program keluarga harapan (PKH) tahun 2020, dan peraturan Menteri sosial republik Indonesia nomor 11 tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang sebagaimana dibentuk karena adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi Widodo pada rapat terbatas tentang Program Raskin di bulan juli tahun 2016. Dan pada program bantuan pemerintah pada masa pandemic covid-19 sasaran dalam program BLT, BPNT, dan PKH ini yaitu warga yang memiliki perekonomian rendah, warga yang terdampak covid-19 dan tidak menerima bantuan sosial lainnya. Sama halnya dengan kriteria bagi penerima BLT, BPNT, dan PKH yaitu warga yang terkena dampak covid-19 dan warga yang kurang mampu.

b. Sosialisasi Program

Dalam tahap sosialisasi program ini masyarakat diberi informasi terkait program BLT, BPNT & PKH. Proses sosialisasi merupakan salah satu proses yang penting dalam melaksanakan program, karena dengan adanya sosialisasi masyarakat akan mengetahui secara jelas apa makna dan tujuan dari suatu program. Akan tetapi pada pelaksanaannya sosialisasi program tersebut tidak berjalan dengan baik diakrenakan kurangnya fasilitas komunikasi yang memadai dan tidak diperbolehkannya berkumpul yang menyebabkan menularnya virus covid-19.

c. Tujuan Program

Tujuan program pada penelitian yaitu Tujuan dari program BLT, BPNT & PKH adalah untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak wabah covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada pandemic covid-19, serta belum sepenuhnya tercapai. Dengan adanya Program BLT, BPNT, & PKH cukup membantu mereka dalam menghidupi keseharian keluarga, walaupun bantuan yang diberikan di rasa masih kurang untuk membantu kehidupan mereka di tengah pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena sulitnya bahan pangan melonjak naik pada masa pandemic covid-19.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan selama program BLT, BPNT &

PKH dimasa pandemi berlangsung. Sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat dalam menangani masyarakat terdampak Covid-19. Pemantauan juga dikatakan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk dapat diambil tindakan sendiri. Pada pemantauan program sudah dikatakan efektif dikarenakan masyarakat dapat menikmati secara langsung bantuan BLT, BPNT, & PKH tersebut.

### **Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Peran Program Pemerintah**

Bantuan Program pemerintah dimasa pandemi yakni BLT, BPNT, & PKH sebagai penolong krisis ekonomi taklain karena adanya covid-19. Semenjak kemunculan wabah covid-19, pendapatan masyarakat pelan-pelan telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Salah satu bentuk bantuan yang ada saat pandemi covid-19 berupa bantuan BLT, BPNT & PKH. Sebagai upaya pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19. Bantuan yang diberikan tersebut bertujuan guna memberikan bantuan kepada para KPM mengalami krisis ekonomi di masa pandemi. Kebijakan pemerintah dalam merespon problematika ekonomi di era pandemi covid-19 melalui program BLT, BPNT & PKH sesuai peran tanggung jawab yang diberikan oleh Negara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Karena Negara memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk kebutuhan ekonomi. Sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam Prespektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum. Sehingga dalam Prespektif Islam, negara dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut. Sehingga kebijakan dan langkah yang diberikan pemerintah di atas merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa dalam hal perekonomian. Begitu juga program pemerintah BLT, BPNT, & PKH merupakan bentuk pertahanan masyarakatnya dari pemerintah dimasa pandemic covid-19. Sehingga program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat termasuk dalam maqashid syari'ah yaitu menjaga keteguhan dalam agama, menjaga kesehatan jiwa dalam menghadapi pandemic covid-19, menjaga akal agar tetap dalam

kesadaran dalam menerima kenyataan hidup, menjaga garis keturunan agar tetap kuat hidup bersama, dan menjaga harta benda yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan di masa yang akan datang.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada aspek ketepatan sasaran disimpulkan bahwa peran program pemerintah pelaksanaan program Bantuan Sosial pada masa pandemic covid-19 di Desa Telukjaya aspek ketepatan sasaran sudah cukup efektif dalam pemilihan sasaran penerima program BLT, BPNT & PKH.
- b. Pada aspek sosialisasi program tidak berjalan dengan baik disebabkan dengan kurangnya fasilitas alat komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat.
- c. Pada aspek tujuan program disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Kementerian Sosial di masa pandemi Covid-19 di lingkungan Desa Telukjaya pada aspek tujuan program baik pihak pelaksana maupun keluarga penerima manfaat (KPM) telah berusaha untuk mewujudkan tujuan program agar berjalan dengan lancar. Sebagian KPM mengetahui tujuan dari program Program yang mereka terima.
- d. Pada aspek pemantauan program disimpulkan bahwa pelaksanaan peran program pemerintah mengenai program BLT, BPNT & PKH dari Kementerian Sosial di masa pandemi Covid-19 di Desa Telukjaya pada aspek pemantaun program adanya pihak dari kelurahan dan RW serta RT yang ikut andil dalam melakukan pemantauan program Program pemerintah. Dengan hal ini dikatakan pemantau program pemerintah sudah dikatakan efektif dalam pelaksanaannya karena dengan terlibatnya pihak kelurahan atau RW dalam memonitoring pelaksanaan penerimaan bantuan program dapat mengetahui masyarakat Desa Telukjaya yang belum terdata.
- e. Tanggung jawab pemerintah dalam Prespektif Islam fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum sehingga dalam Prespektif Islam negara dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai tujuan tersebut. Sesuai pada upaya aparat Desa Telukjaya dalam menghadapi setiap

masalah mengenai bansos dan adanya program BLT, BPNT & PKH merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat pada masa pandemi. Dengan demikian program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat termasuk kepada maqashid syari'ah yaitu menjaga keteguhan dalam agama, menjaga kesehatan jiwa dalam menghadapi pandemic covid-19, menjaga akal agar tetap dalam kesadaran dalam menerima kenyataan hidup, menjaga garis keturunan agar tetap kuat hidup bersama, dan menjaga harta benda yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan di masa yang akan datang

#### **5. REFERENSI**

##### **BUKU**

- Kementrian PPN/Bappenas. (2020). *"Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Blt-Dana Desa"* KOMPAK Jakarta Indonesia.
- PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK INDIVIDU, KELUARGA, DAN KELOMPOK TIDAK MAMPU Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi RINGKASAN EKSEKUTIF (2018) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

##### **JURNAL**

- Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin. (2020). *"Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah."* Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam Vol5, No. 2.
- Dini, Anisa Rahma. Nurmalia, Yunisca. Halim, Abdul. (2018) *"Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Di Kelurahan Gulakgalik"*. Lampung
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. Jakarta: UNJ PRESS
- Ibrahim, Anwar. (2021) *"Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Sermon Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 "*. Mataram.
- Iqbal Abdul Muin, Mohd. Lubis, Siti Abidah. (2020). *"Peran Dinas Social Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sikalang Kabupaten Dairi"*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Kabupaten Dairi
- Julianto, Pebi. (2020), *"Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci"*. IAIN Kerinci.

- Kuni Nabila, Kuni. Suharso, Pudjo. Hartanto, Wiwin. 2021, "Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember". Jember.
- Lestari, D. S., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 288-297. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Mariana, Surya. (2021). "Peran Dinas Social Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan". Iain Purwakerto
- MH Ainulyaqin, Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 51 - 60. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Mustafida, Nunung Ifnatul. (2019), "Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai (Bpnt) Di Desa Kajarharjo Kecamatan Kali Baru Kabupaten Banyuwangi". Jember Digital repository.
- Regina, wowiling. 2021 "Peran pemerintah dalam penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat di masa pandemic covid-19 di kecamatan maesaan kabupaten minahasa selatan". Minasahah Selatan.
- Rokhoul Alamin, Ahmad. (2010). "Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) PAD Suku Dinas Social Jakarta Utara ." UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Safitri, Dwi. (2021) "Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dikecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga". IAIN Purwakerto, Purwakerto.
- Saroh, S., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M.H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378-386. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>
- Sihabudin, F., Achmad, L. I., 'Ainulyaqin, M. H., Midisen, K., & Edy, S. (2022). Analysis of Blockchain Technology and Security Principles in Cryptocurrency Transactions according to the perspective of Islamic Economics: Case study : Smart Contract on the Ethereum Blockchain Network. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 11-20. <https://doi.org/10.58223/taamul.v1i1.2>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA CV
- Suardi, Didi (2021). "MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM". TANGGERANG BANTEN.

**Sumber Lainnya:**

- Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/Bs.02.01/01/2020. Tentang "Indeks Dan Faktor Penimbangan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020"
- Peraturan No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Melalui Pemberian Dana Langsung Tunai Bantuan- Dana Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Program Raskin.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/Pmk.07.2021 Tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya".
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.